BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Koran Tempo
Subyek : Kehutanan
Edisi : 11 April 2008
Halaman : A1

Kaban Tetap Alihkan Fungsi Hutan Bintan

"Itu tak cocok untuk ibu kota kabupaten."

JAKARTA -- Departemen Kehutanan tetap melanjutkan keputusan pencabutan status hutan lindung yang akan diubah menjadi lahan ibu kota Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Keputusan itu tak terpengaruh meski anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Al-Amin Nur Nasution, tertangkap basah menerima duit yang diduga terkait dengan pengalihan fungsi hutan tersebut.

"Kasus tertangkapnya Al-Amin tidak ada kaitannya dengan rencana pengalihan ini," ujar Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban kepada *Tempo* di Jakarta kemarin. Menurut dia, pelepasan alih fungsi hutan telah disetujui oleh Komisi Kehutanan dan Pertanian (IV) DPR dalam rapat kerja pada 8 April lalu. Bahkan, menurut Kaban, dalam rapat juga disetujui pembentukan tim penelitian untuk pengalihan fungsi hutan lindung di daerah lainnya. Misalnya di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo.

Ketua Komisi Kehutanan Ishartanto juga memastikan keputusan Komisi IV soal pengalihan fungsi hutan seluas 6.800 hektare itu tetap dilanjutkan. "Tidak ada pembahasan ulang keputusan tersebut meski Al-Amin ditangkap," katanya kemarin. Al-Amin ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu dinihari lalu di Hotel Ritz Carlton, Jakarta.

Menurut Ishartanto, persetujuan DPR sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa perubahan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR berdasarkan penelitian tim terpadu. Rekomendasi ini diberikan setelah mengacu pada penelitian tim tersebut. Tim terpadu itu terdiri atas ahli dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Dinas Kabupaten Bintan.

Namun, juru bicara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Rully Sumanda, curiga, adanya penyuapan tersebut menunjukkan ada yang tidak beres dengan keputusan DPR dan pemerintah. Apalagi hutan di Bintan Bunyu itu terletak di Pulau Penyengat, yang akan dialihkan menjadi kawasan wisata. "Itu tak cocok untuk ibu kota kabupaten," ujarnya.

Rully juga tidak yakin keputusan itu sudah mengacu pada analisis mengenai dampak lingkungan yang memadai. Sedangkan aktivis lingkungan dari Sawit Watch, Eddy Sutrisno, menduga keputusan pengalihan itu belum tentu disetujui oleh masyarakat di sana. "Padahal mereka yang akan merasakan dampaknya," katanya.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Anggota Komisi IV DPR, Fahri Andi Leluasa, meminta Menteri Kehutanan berhati-hati menindaklanjuti keputusan itu. Sebab, pengalihan fungsi itu menjadi sorotan di dalam dan luar negeri. "Kalau ada masalah, Menteri Kehutanan harus bertanggung jawab." **HERI | FANNY FEBYANTI | ARTI EKAWATI | DWI RIYANTO**

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup